

AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN PADA INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN PRINSIP ISLAM (STUDI: SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH)

**Muhammad Nurfaizy Hamdan^{1*}, Fatahillah Ruslan²,
Riswanda Patriansah Husain³, Suhartono⁴, Roby Aditiya⁵**

^{1,2,3,4,5}Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

Abstract, *This study aims to determine the use of budgets in Makassar city government agencies, to determine the accountability system for budget use at the Makassar City Manpower Office and to determine the application of Islamic principles in creating accountable use of budgets in the Makassar City Manpower Office. The method in accordance with this research is qualitative research methods. This type of research used in this study is a type of qualitative research based on a descriptive analytical approach. The type of data needed by researchers in this study includes secondary data. The instruments used by researchers in this case are the main instruments and supporting instruments. The principal instrument is the journal itself. In addition, this research was also conducted by downloading the required data. The results of this study that the budget allocation in the Makassar SKPD has been realized effectively or it is commonly said that the use of budgets in the Makassar government agency has run accountably. The accountability report for the use of budgets at the Makassar city manpower office has been presented in an accountable manner and the realization of the budget is in accordance with the expected objectives. Carrying out accountability as a manifestation of accountability based on shidiq, mandate and tabligh can motivate each individual to create an accountable budget realization report.*

Keywords: *Accountability, Use of Orchids, Islamic Principles.*

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan anggaran di instansi pemerintah kota Makassar, untuk mengetahui sistem akuntabilitas penggunaan anggaran pada dinas tenaga kerja kota Makassar dan untuk mengetahui penerapan prinsip islam dalam menciptakan penggunaan anggaran yang akuntabel pada dinas tenaga kerja kota Makassar. metode yang sesuai dengan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berdasarkan pada pendekatan deskriptif analitis. Jenis data yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini meliputi data sekunder. Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah jurnal itu sendiri. selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan mengunduh data-data yang dibutuhkan. Hasil dari penelitian ini alokasi anggaran pada SKPD Makassar telah teralisasi secara efektif atau biasa dikatakan bahwa penggunaan anggaran di instansi pemerintah Makassar telah berjalan secara akuntabel. Laporan akuntabilitas penggunaan anggaran pada dinas tenaga kerja kota Makassar telah disajikan secara akuntabilitas dan realisasi anggarannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Melakukan pertanggungjawaban sebagai perwujudan akuntabilitas berdasarkan shidiq, amanah dan tabligh dapat memotivasi setiap individu dalam mewujudkan laporan realisasi penggunaan anggaran yang akuntabel.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Penggunaan Anggaran, Prinsip Islam.*

PENDAHULUAN

Negara-negara *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), merupakan Negara yang tergabung dalam memenuhi kebutuhan penting dari pemerintahan yang baik. Negara yang bergabung di organisasi OECD tidak ada bukti

***Koresponden:**

muhammadnurfaizyhamdan@gmail.com

bahwa Negara yang bergabung dalam organisasi ini menghasilkan kualitas pemerintahan yang rendah melainkan menghasilkan kualitas pemerintah yang baik selama ini. Di sisi lain, juri masih keluar pada percobaan lembaga dalam perekonomian dunia dan transisi berkembang. Beberapa lembaga tampaknya memiliki manfaat yang diciptakan; orang lain telah menyebabkan masalah yang signifikan bagi pemerintahan umum (Rob laking, 2005). Pemerintah negara-negara OECD berada di bawah tekanan untuk meningkatkan kinerja sektor publik dan pada saat yang sama mengandung pertumbuhan pengeluaran. Sementara faktor-faktor seperti penuaan populasi dan meningkatkan biaya perawatan kesehatan dan pensiun menambah tekanan anggaran, warga menuntut agar pemerintah dibuat lebih akuntabel untuk apa yang mereka capai dengan uang pembayar pajak (Ryan, *et. al.*, 2002). Artikel ini secara singkat ulasan driver institusional utama yang dapat berkontribusi untuk meningkatkan efisiensi sektor publik, dan berfokus pada salah satu dari mereka secara lebih rinci: informasi kinerja dan peran dan digunakan dalam proses anggaran (Curristine dkk, 2007) Masyarakat selaku pemangku kepentingan pemerintah memiliki hak untuk memantau kinerja lembaga pemerintah terhadap akuntabilitas pemerintah. Dengan adanya penilaian secara menyeluruh, maka para pemangku kepentingan akan dapat mengetahui akuntabilitas masing-masing entitas pemerintah dan diharapkan dapat memotivasi pemerintah untuk melakukan perbaikan (Afriyanti dkk, 2015). instansi pemerintah membutuhkan anggaran untuk menerjemahkan keseluruhan strategi ke dalam rencana dan tujuan jangka pendek juga jangka panjang (Anwar dkk, 2012)

Menurut Basri, (2013) Anggaran merupakan rencana keuangan masa datang yang mencakup harapan manajemen terhadap pendapatan, biaya dan transaksi keuangan lain dalam masa satu tahun. Dalam konteks anggaran organisasi sektor publik, anggaran mencakup rencana-rencana tentang berapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa banyak serta bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. anggaran bukanlah proses yang berdiri sendiri, dikeluarkan dari saluran lain dari tindakan pemerintah. penganggaran yang baik didukung oleh, dan pada gilirannya mendukung, berbagai pilar pemerintahan modern publik: integritas, keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas dan pendekatan strategis untuk perencanaan dan mencapai tujuan nasional. Penganggaran demikian merupakan kunci penting dalam arsitektur kepercayaan antara negara dan warga negara mereka yang dimana penganggaran di sama dengan penggunaan anggaran. Waworuntu dan Runtu, (2014) Perubahan sistem penganggaran di Indonesia ke sistem penganggaran yang berbasis kinerja merupakan faktor penting untuk mendorong dan meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah dan dalam mendukung terselenggaranya *Good Governance* yang merupakan prasyarat utama dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Penganggaran berbasis kinerja berorientasi bagaimana para pemimpin mendayagunakan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. perspektif baru ini telah menyebabkan rakit inisiatif yang berusaha untuk mempromosikan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik dalam proses anggaran (Lehman, 2005). Untuk saat ini, bagaimanapun, inisiatif tersebut belum sistematis dinilai. Mengingat momentum yang sedang berlangsung di kalangan pengembangan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas inisiatif terkait anggaran penting untuk mengambil stok dan menentukan apakah inisiatif tersebut kemungkinan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Carlitz, 2010).

Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini yang menunjukkan terdapat banyaknya penyelewengan ataupun penyimpangan dalam penggunaan anggaran di instansi-instansi pemerintah. Pengguna anggaran adalah istilah yang digunakan pada peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia yang merujuk pada pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang berada di kementerian, lembaga, bagian dari satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang disamakan pada instansi pengguna anggaran. Anggaran (budget) merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dan direncanakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang (Julita, 2012). Aspek sumber daya manusia sebagai penyusun dan pelaksana anggaran haruslah dipertimbangkan karena anggaran akan dipengaruhi oleh perilaku manusia

terutama bagi pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, apabila dalam penyusunan anggaran tidak memperhatikan salah satu pihak, atau komunikasi antara bawahan dan atasan kurang berjalan dengan baik, maka kemungkinan bisa mengakibatkan sistem anggaran gagal dikarenakan adanya pihak yang kurang puas dengan anggaran yang telah disusun (Alfebrianto, 2013).

Tingkat akuntabilitas di Indonesia masih lemah sehingga perlu dilakukan suatu upaya perbaikan. Sebagai salah satu upaya untuk mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitasnya, pemerintah telah memberikan penghargaan atas akuntabilitas entitas (Afriyanti dkk, 2015). Pangumbalerang, (2014) Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi fenomena global termasuk di Indonesia, sehingga menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintahan termasuk dibidang pengelolaan keuangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perhatian terhadap isu transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di Indonesia semakin meningkat dalam dekade terakhir ini. Hal ini terutama disebabkan oleh dua faktor berikutinyaitu: 1. Krisis ekonomi dan turbulen fiskal telah memberi kontribusi terhadap erosi substansial kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. 2. Desentralisasifiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, telah menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Aliya dan Nahar, 2012). Menurut Hamidi (2014) Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah (AKIP) yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) harus berdasarkan antara lain pada prinsip – prinsip. Akuntabilitas penggunaan anggaran baik itu aggaran dana desa yang di salurkan kesuruh daerah melalui SKPD haruslah merata demi kesejatraan masyarakat Indonesia. Akuntabilitas yang dilakukan dengan baik haruslah dilakukan sesuai undang-undang dan syariat atau prinsip islam yang telah ditetapkan dalam Al-quran.

Islam yang mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari (Baidhowi dan Zaki 2014). Mursal dan Suhadi, (2015) Menyatakan Islam merupakan ajaran Ilahi yang bersifat integral (menyatu) dan komprehensif (mencakup segala aspek kehidupan). Oleh sebab itu, Islam harus dilihat dan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif pula. Semua pekerjaan atau aktivitas dalam Islam, termasuk aktivitas ekonomi, harus tetap dalam bingkai akidah dan syari'ah (hukum-hukum agama). Islam tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai tujuan dan keinginannya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap dan perbuatan batil lainnya. Tetapi dalam Islam diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan salah serta yang halal dan yang haram (Amalia, 2013). Prinsip yang telah berusia ratusan tahun dan yang seharusnya menjadi sendi-sendi pemerintahan dalam negara demokrasi modern, yaitu bagaimana penyelenggaraan pemerintahan tersebut mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta membuka ruang bagi keterlibatan warga masyarakat yang didasari dengan ketentuan agama islam yang diatur oleh Allah SWT didalam Al-quran untuk tetap terus bersifat jujur dan bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Prinsip islam akan mendasari jalan pemerintah yang baik untuk kemajuan Negara baik disektor publik.

Wina dan Khairani (2008) mengatakan setiap negara menginginkan pemerintahan yang dapat berupaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan *Good Governance*. Salah satu prinsip strategis yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah prinsip tata kelola keuangan. Untuk menciptakan prinsip tata kelola keuangan yang baik diperlukan penguatan sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan serta standar penyajian laporan keuangan yang berlaku. Organisasi termasuk organisasi sektor publik perlu mengetahui kinerjanya untuk mengetahui hasil pencapaiannya. Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang menggunakan dana publik untuk menyediakan kebutuhan barang dan jasa publik. Sebagai organisasi

yang menggunakan dana publik maka publik perlu mengetahui bagaimana pengelolaan dananya (Fitriyani, 2014). Menurut Purnama dan Nadirsyah (2016) Sebagai organisasi sector publik, pemerintah dituntut untuk melaksanakan kinerja yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Perguruan tinggi sebagai salah satu unit satuan kerja pemerintah yang memberi pelayanan kepada masyarakat mempunyai karakteristik dan sifat yang berbeda dengan satuan kerja pemerintah pada umumnya. Kemudian karakteristik penerimaan yang dilakukan sebagai satuan kerja juga mempunyai karakteristik yang berbeda (Jaya, 2011).

Merujuk pada latar belakang diatas, maka masalah dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penggunaan anggaran di instansi pemerintah kota Makassar?
2. Bagaimana sistem akuntabilitas penggunaan anggaran pada Dinas tenaga kerja kota Makassar?
3. Bagaimana penerapan prinsip islam dalam mencitptakan penggunaan anggran yang akuntabel pada dinas tenaga kerja kota Makassar kota Makassar?

TINJAUAN LITERATUR

Teori Keagenan (Agency Theory)

Konsep-konsep teori keagenan di latarbelakangi oleh berbagai teori sebelumnya seperti teori konsep biaya transaksi, teori property right, dan filsafat utilitarisme. Teori keagenan (agency theory) dikembangkan di tahun 1970-an terutama pada tulisan Jensen dan Meckling pada tulisan yang berjudul "Theory of the Firm" menjelaskan hubungan keagenan didalam teori agensi (agency theory) yang merupakan kumpulan kontrak yang mengurus penggunaan dan pengendalian tersebut.20 Teori keagenan dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul manakala ada ketidaklengkapan informasi pada saat melakukan kontrak (perikatan). Agency theory menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu principal dan agent. Agency theory membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (principal) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (agent) yang melakukan pekerjaan. Agency theory memandang bahwa agent tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan. Menjelaskan mengapa konflik ada di antara yang mengarah ke biaya agensi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi sehingga baik pokok dan agen membaca dari script yang sama melalui ancaman sanksi dan kemungkinan insentif (Kerry, 2004).

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performanya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya (Sulfiati, 2010). Pangumbalerang, (2014) Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi fenomena global termasuk di Indonesia, sehingga menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintahan termasuk dibidang pengelolaan keuangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Prinsip akuntabilitas ini sudah banyak diterapkan di sektor publik gunamewujudkan tata kelola yang baik. Ruang lingkup akuntabilitas tidak saja pada bidang keuangan, tetapi meliputi, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas hukum, akuntabilitas program, akuntabilitas proses dan akuntabilitas hasil (Boy dan Siringoringo, 2009). Menurut Hamidi (2014) Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah (AKIP) yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) harus berdasarkan antara lain pada prinsip – prinsip. Akuntabilitas penggunaan anggran baik itu aggaran dana desa yang di salurkan kesuruh daerah melalu SKPD haruslah merata demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Akuntabilitas memiliki tujuan ekonomi dan sosial, namun akuntabilitas Islam memiliki tujuan yang lebih luas yaitu tujuan ekonomi, politik, keagamaan dan sosial (Andreaus, 2014). Artinya akuntabilitas menurut hukum ilahi Islam adalah cara untuk sumber kehidupan yang dalam pengertian teknis merujuk kepada sistem hokum sesuai dengan Al Qur'an dan hadist Epstein dan McFarlan, (2011) mendefinisikan hokum Islam sebagai disiplin hermeneutik yang membahas dan menafsirkan wahyu melalui hadist. Al-Qur'an dan sunah

mendefinisikan dengan jelas apa yang benar, jujur dan adil, apa yang menjadi preferensi prioritas masyarakat, apa peran dan tanggung jawab perusahaan, dan juga, dalam beberapa aspek, menguraikan standar akuntansi khusus untuk praktik akuntansi.

Prinsip Islam

Akuntansi menurut perspektif Islam adalah semua tentang norma-norma positif dan membawa nilai-nilai keTuhanan (*self-transendent*) dalam kehidupan sehari-hari, mencari kehendak Allah dan mengikuti perintahnya dalam bentuk Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tujuan akuntansi dan manajemen Islam bukan hanya duniawi dan yang berorientasi uang, tapi berusaha untuk mencari hadiah intrinsik jangka panjang, keberkahan Allah (Ahmed, 2012). Ulama berpendapat bahwa banyak karakteristik spiritualitas di tempat kerja adalah dasar tema Islam. Karakteristik dapat mencakup pembangunan masyarakat, kepedulian keadilan sosial dalam organisasi dan visi, dan kesetaraan suara (Kriger dan Seng, 2005). Nilai-nilai pelayanan, menyerah diri, kebenaran, amal, kerendahan hati, pengampunan, belas kasih, rasa syukur, cinta, keberanian, iman, kebaikan, kesabaran, dan harapan, dalam literature spiritualitas di tempat kerja (Fry, 2005) yang dapat ditemukan tidak hanya dalam Al Qur'an, tetapi juga dalam sastra populer Islam, perdebatan filosofis dan mistik Islam esoteris, tasawuf (Kriger dan Seng, 2005).

Sistem-sistem Akuntansi yang terpenting untuk iman seorang Muslim adalah pertanggungjawaban kepada Allah dan masyarakat akuntansi bertanggung jawab atas sumber daya ekonomi yang dikelolanya terlepas dari apakah transaksi dan sumber daya tersebut adalah orang-orang dari sebuah organisasi pemerintah atau badan swasta. Fungsi pelayanan ini telah menjadi aktivitas manusia yang terorganisir dari awal kali (Prasetyo, 2017). Ayat yang mengenai penelitian ini :

QS Al-Baqarah/2: 284.

Terjemahnya:

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS Al-Baqarah: 284).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk tidak menyembunyikan kebenaran, karena Allah akan memberikan balasan setiapperbuatan yang dilakukan, dalam hal ini untuk memperbaiki pengelolaan anggaran pemerintah maka penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintah menjadi sangat penting dalam menjamin upaya pemanfaatan aset desa bagi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat Indonesia.

Dikaitkan mengenai PPH 71 dimana Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memasuki babak baru. Melalui PP 71 Tahun 2010 (Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005) SAP kini didasarkan pada basis akrual. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari tiga lampiran utama, yaitu : Lampiran I : Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Lampiran II : Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas Menuju Akrual Lampiran III : Proses Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual.

Akuntansi Berbasis Akrual adalah suatu Basis Akuntansi yang transaksi Ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam Laporan Keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam Akuntansi Berbasis Akrual waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Pengaruh pengakuan akrual dalam Akuntansi Berbasis Kas menuju Akrual sudah banyak diakomodasi di dalam laporan keuangan terutama neraca yang disusun sesuai dengan PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Keberadaan pos piutang, aset tetap, dan hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual. Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian,

maka kelebihan yang diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambarnya informasi operasi atau kegiatan. Dalam Akuntansi Pemerintahan, gambaran perkembangan operasi atau kegiatan ini dituangkan dalam bentuk Laporan Operasional atau Laporan Surplus/Defisit. Berhubungan dengan ini ayat yang membahas mengenai akuntansi akrual adalah Ayat QS Al-Baqarah/2:282:

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Shidiq (Jujur)

Kejujuran dalam islam atau dikenal dengan istilah *As-Shidqu* ialah kesesuaian pembicaraan dengan kenyataan menurut keyakinan orang yang berbicara, *As-Sidqhu* ini kebalikan dari *Al-Kadzibu* (bohong). Ada yang mengatakan *As-Shidqu* ialah kesesuaian ucapan hati dengan sesuatu yang dikabarkan (dhahirnya) secara bersamaan, jika salah satu syarat tersebut hilang maka tidak dinamakan jujur secara sempurna. *As-Sidqhu* ini memiliki keutamaan yang agung, pahala yang besar/banyak, serta kedudukan yang mulia. Jujur dan benar di antara bagian dari *Ash-Shidu*. Dan bukti dari keutamaan *Sidqhu*, ketinggian kedudukannya, serta kemuliaan derajatnya ialah: Sesungguhnya *As-Sidqhu* menjadi ciri khas *ahlul ilmi* dan takwa. Alloh ta'ala berfirman:

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang sidiqin (benar), laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Alloh, Alloh Telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”.(QS. Al-Ahzab: 35).

Berdasarkan uraian terdahulu jelaslah bahwa jujur adalah suatu sikap yang dilakukan seseorang/individu atau kelompok kepada seseorang atau kelompok tentang apa yang didengar, dilihat dan dilakukannya tanpa adanya pengurangan atau penambahan/rekayasa dari apa yang dialaminya serta perlakuannya didasari dengan berpikir positif, berbuat sesuai dengan aturan dan tata nilai dan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya dan senantiasa berupaya untuk dipercaya oleh berbagai pihak (Bukhury *et. Al.*,2017).

Amanah

Amanah artinya dapat dipercaya. Setiap ucapan dan perbuatan seorang rasul itu dapat dipercaya, karena setiap rasul tidak mungkin melakukan segala macam bentuk kemaksiatan. Iapun tidak memiliki sifat-sifat buruk seperti hasud, riya', sombong, dusta dan lain sebagainya. Kebalikan dari sifat ini adalah khiyanah (tidak dapat dipercaya). Sifat ini juga mustahil bagi para rasul.

Amanah menurut terminologi Islam adalah setiap yang dibebankan kepada manusia dari Allah *Ta'ala* seperti kewajiban-kewajiban agama, atau dari manusia seperti titipan harta. Luasnya ruang lingkup amanah disebutkan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya *Islamuna: Amanah* adalah segala sesuatu yang wajib dipelihara dan ditunaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Amanah adalah kata yang pengertiannya luas mencakup segala hubungan. Konsisten dalam keimanan serta merawayatnya dengan faktor-faktor yang menyebabkan berkembang dan kekalnya adalah amanah, memurnikan ibadah kepada Allah adalah amanah, berinteraksi secara baik dengan perorangan dan kelompok adalah amanah; dan memberikan setiap hak kepada pemiliknya adalah amanah.

Tabligh (Menyampaikan)

Segala firman Allah yang ditujukan oleh manusia, disampaikan oleh Nabi. Tidak ada yang disembunyikan meski itu menyinggung Nabi. "Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu." [Al Jin 28] "Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya" [Abasa 1-2]

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa firman Allah S.80:1 turun berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum yang buta yang datang kepada Rasulullah saw. sambil berkata: "Berilah petunjuk kepadaku ya Rasulullah." Pada waktu itu Rasulullah saw. sedang menghadapi para pembesar kaum musyrikin Quraisy, sehingga Rasulullah berpaling daripadanya dan tetap menghadapi pembesar-pembesar Quraisy. Ummi Maktum berkata: "Apakah yang saya katakan ini mengganggu tuan?" Rasulullah menjawab: "Tidak." Ayat ini (S.80:1-10) turun sebagai teguran atas perbuatan Rasulullah saw. (Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim yang bersumber dari 'Aisyah. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Ya'la yang bersumber dari Anas.)

Sebetulnya apa yang dilakukan Nabi itu menurut standar umum adalah hal yang wajar. Saat sedang berbicara di depan umum atau dengan seseorang, tentu kita tidak suka diinterupsi oleh orang lain. Namun untuk standar Nabi, itu tidak cukup. Oleh karena itulah Allah menegurnya. Sebagai seorang yang tabligh, meski ayat itu menyindirnya, Nabi Muhammad tetap menyampaikannya kepada kita. Itulah sifat seorang Nabi. Tidak mungkin Nabi itu Kitman atau menyembunyikan wahyu.

Tabligh : artinya menyampaikan. Setiap rasul pasti menyampaikan apa yang telah diwahyukan oleh Allah SWT kepadanya. Dalam al-Qur'an disebutkan:

أَبْلَغُكُمْ رَسُولَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحَ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku _orlvd nasehat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui." (QS. Al-A'raf : 62). Kebalikan dari sifat ini adalah kitman (menyembunyikan). Para Rasul mustahil menyimpan apapun yang telah diwahyukan kepadanya.

Anggaran

Menurut Basri, (2013) Anggaran merupakan rencana keuangan masa datang yang mencakup harapan manajemen terhadap pendapatan, biaya dan transaksi keuangan lain dalam masa satu tahun. Dalam konteks anggaran organisasi sektor publik, anggaran mencakup rencana-rencana tentang berapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa banyak serta bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (Kearns, Pembuatan anggaran dilakukan dalam perencanaan operasional. Berdasarkan tujuan strategis, anggaran memecahkan masalah mendistribusikan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu pemerintah tujuan dan sasaran umum diatasi ketika melaksanakan perencanaan anggaran dan metode adalah: Membangun perasional dan keuangan yang efisien; perencanaan operasional yang efisien kegiatan keuangan dan ekonomi negara; optimalisasi pemanfaatan sumber daya, pengurangan biaya produksi dan biaya perbaikan penganggaran dengan menetapkan standar biaya anggaran, kontrol yang efektif dan analisis varians (Klychova dkk, 2014) Dalam bentuk sederhana anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas (Vialipangau dan Retnani, 2013).

Penganggaran

Penganggaran adalah teknik perencanaan keuangan, pencatatan dan pengeluaran monitoring dan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan komersial sama sekali tingkatan dan menganalisis memungkinkan dari yang diperkirakan dan mencapai keuangan kinerja. Ini adalah proses merinci, melaksanakan, memantau dan menganalisis rencana keuangan yang mencakup semua bidang kegiatan usaha dan memungkinkan membandingkan semua biaya yang dikeluarkan dan hasil yang dicapai untuk periode mendatang secara keseluruhan dan untuk sub-periode yang terpisah. (Klychova dkk, 2014). Kegiatan perencanaan dan penganggaran yang melibatkan seluruh unsure pelaksana yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mulai dari penentuan program dan kegiatan, klasifikasi belanja, penentuan standar biaya, penentuan indikator kinerja dan target kinerja, sampai dengan jumlah anggaran yang harus disediakan, memerlukan perhatian yang serius bagi pimpinan satuan kerja perangkat daerah beserta pelaksana program dan kegiatan. Dokumen anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan (Hamidi, 2014).

Penganggaran merupakan tingkat yang lebih tinggi dari pengembangan dan memungkinkan fokus pada hasil jangka panjang, penggunaan efektif sumber daya keuangan, kegiatan usaha mengawasi pemerintah, membantu dalam membuat suara dan keputusan yang tepat waktu (Maddocks, 2011). Penganggaran membantu pemerintah yang efektif dan kinerja keuangan, memungkinkan pemerintah untuk membandingkan semua biaya yang direncanakan dan pendapatan diantisipasi untuk periode mendatang. penganggaran merupakan salah satu tugas pemerintah setiap tahun, namun berbagai persoalan masih sulit diselesaikan. Hal ini mengingat proses tersebut sangat luas dengan melibatkan banyak sumber daya, dipengaruhi juga oleh factor internal dan eksternal, serta ketidakpastian ekonomi dan politik (Pangau dan Retnani, 2013).

Penggunaan Anggaran

Pengguna anggaran adalah istilah yang digunakan pada peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia yang merujuk pada pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang berada di kementerian, lembaga, bagian dari satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna anggaran (Mathews, 1997). Anggaran (budget) merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dan direncanakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang (Julita, 2012). Aspek sumber daya manusia sebagai penyusun dan pelaksana anggaran haruslah dipertimbangkan karena anggaran akan dipengaruhi oleh perilaku manusia terutama bagi pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, apabila dalam penyusunan anggaran tidak memperhatikan salah satu pihak, atau komunikasi antara bawahan dan atasan kurang berjalan dengan baik, maka kemungkinan bisa mengakibatkan sistem anggaran gagal dikarenakan adanya pihak yang kurang puas dengan anggaran yang telah disusun (Alfebrianto, 2013).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan seorang peneliti untuk mendekati problem dan mencari pemecahan yang sesuai (Mulyana, 2006:145). Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka metode yang sesuai dengan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010:1). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berdasarkan pada pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif analitis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan merekap data dengan penjelasan didalamnya. Subjek penelitian merupakan sesuatu yang diteliti,

oleh karena itu subjek pada penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini meliputi data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak ketiga, yaitu dokumentasi dari akses internet dengan mengambil artikel dari beberapa situs internet, serta mempelajari literatur-literatur serta bacaan yang berhubungan dengan penelitian. Menelaah gambaran umum pada SKPD Kota Makassar dalam merealisasikan penggunaan anggaran di Kota Makassar.

Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto dalam edisi sebelumnya adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis, sehingga mudah diolah.

Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah jurnal itu sendiri. selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan mengunduh data-data yang dibutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Anggaran Pada Istansi Pemerintah

Pengguna anggaran adalah istilah yang digunakan pada peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia yang merujuk pada pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang berada di kementerian, lembaga, bagian dari satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada pemerintah pusat, pelaksanaan APBN dimulai dengan diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA. Segera setelah suatu tahun anggaran dimulai (1 Januari), maka DIPA harus segera diterbitkan untuk dibagikan kepada satuan-satuan kerja sebagai pengguna anggaran pada kementerian/lembaga. Seperti pada pemerintah pusat, pada pemerintah daerah juga harus menempuh cara yang sama dengan sedikit tambahan prosedur. Setelah terbit Peraturan Daerah tentang APBD, SKPD wajib menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA. Dengan demikian maka fleksibilitas penggunaan anggaran diberikan kepada Pengguna Anggaran.

Dalam Pelaksanaan APBN tahun anggaran berjalan, pemerintah pusat menyusun laporan realisasi tahun 2016 APBN, kemudian disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah pusat. Mengenai penyesuaian APBN dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan pemerintah pusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan. Penggunaan anggaran APBN harus nyata ataupun terealisasi dengan baik pada setiap skpd kota Makassar adapun laporan realisasi anggaran pada skpd kota Makassar.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2016 di SKPD Makassar anggaran yang dialokasikan disetiap instansi pemerintah yakni sebesar Rp.3.905.887.927.000,00 Dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.278.340.966.082,69 hal ini dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran pada SKPD Makassar telah teralisasi secara efektif atau biasa dikatakan bahwa penggunaan anggaran di instansi pemerintah Makassar telah berjalan secara akuntabel.

Sistem Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar

Dinas Tenaga Kerja dalam Tahun Anggaran 2016 mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 23.926.740.000,- dengan realisasi selama tahun 2016 sebesar Rp.21.709.104.801,- atau sebesar 90,73%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Uraian Anggaran dan Realisasi Tahun 2016

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Tidak Langsung	5.265.208.000	5.225.155.821	99,24%
- Belanja Pegawai	5.265.208.000	5.225.155.821	99,24%
Belanja Langsung	21.316.450.000	18.481.456.461	86,70%
- Belanja Pegawai	3.331.575.000	3.305.650.000	99,22%
- Belanja Barang dan Jasa	17.813.875.000	15.004.806.461	84,23%
- Belanja Modal	171.000.000	171.000.000	100,00%
Total Belanja	26.581.658.000	23.706.612.282	89,18%

Sumber: <https://disnaker.makassar.go.id>

Realisasi belanja tahun 2016 sebesar Rp23.706.612.282 atau 89,18%% dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp26.581.658.000 terdiri dari realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp5.225.155.821 atau 99,24% dari alokasi anggaran sebesar Rp5.265.208.000 dan realisasi belanja langsung sebesar Rp18.481.456.461 atau 86,70% dari alokasi anggaran sebesar Rp21.316.450.000.

Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp5.225.155.821 merupakan realisasi belanja pegawai berstatus PNS pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp18.481.456.461 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp3.305.650.000 atau 99,22% dari alokasi anggaran sebesar Rp3.331.575.000, belanja barang dan jasa sebesar Rp15.004.806.461 atau 84,23% dari alokasi anggaran sebesar Rp17.813.875.000 dan belanja modal sebesar Rp 171.000.000 atau 100% dari alokasi anggaran sebesar Rp 171.000.000.

Sedangkan target dan realisasi anggaran per program yang telah dicapai pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Target dan Realisasi Anggaran Perprogram Tahun 2016

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Prosentase (%)
	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.742.587.400	1.677.263.800	96,25%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	448.764.800	409.493.360	91,25%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	60.500.000	60.500.000	100,00%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150.000.000	122.157.000	81,44%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	512.000.000	480.800.000	93,91%
6	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	6.910.253.200	4.258.769.000	61,63%
7	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	4.531.649.600	4.529.005.600	99,94%
8	Program pengembangan hubungan Industrial dan Lembaga Ketenagakerjaan	3.522.439.100	3.511.617.600	99,69%
9	Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	3.438.255.000	3.431.851.300	99,81%
	Jumlah	21.316.450.000	18.481.456.461	86,70%

Sumber: <https://disnaker.makassar.go.id>

Laporan pertanggungjawaban pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar tahun 2016 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga

Kota Makassar Kerja Tahun 2014-2019 tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini. Secara umum capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar ditahun 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar telah dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan Kinerja. Hal ini dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama rata-rata Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar adalah sebagai berikut :
 - a. Sasaran Pertama, “Terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya saing” rata-rata capaiannya sebesar 100,64%;
 - b. Sasaran Kedua, “Terpenuhinya Kebutuhan Lapangan Kerja dan Lapangan Usaha dibidang ketenaga kerjaan yang cepat, profesional dan memuaskan” rata-rata capainnya sebesar 158,28%;
 - c. Sasaran Ketiga, “Terciptanya Hubungan yang Harmonis antara Pekerja dan Pengusaha” rata-rata capaiannya sebesar 85,83%.
 - d. Sasaran Keempat “Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja” rata-rata capaiannya sebesar 82,50%.
 - e. Sasaran Kelima “Terwujudnya Lingkungan Kerja yang Aman, Sehat dan Nyaman” rata-rata capainnya sebesar 122,00%.
 - f. Sasaran Keenam “Terwujudnya Perlindungan Hak Dasar Pekerja” rata-rata capaiannya sebesar 101,26%.
 - g. Sasaran Ketujuh “Terwujudnya Administrasi Pemerintahan Pemerintahan yang Efisien dan Efektif “ rata-rata capaiannya sebesar 97,65%.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi ditahun 2016 perlu dilakukan upaya menyusun dan menetapkan indikator kinerja melalui koordinasi internal Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, untuk membahas dan menyepakati indikator kinerja atas program kegiatan yang dilaksanakan pada bagian-bagian sehingga dapat memperjelas target tujuan yang hendak dicapai dengan ukuran yang tersusun secara sinergis, sistematis, dan secara signifikan terarah pada peningkatan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Dapat disimpulkan dengan demikian Laporan akuntabilitas penggunaan anggaran pada dinas tenaga kerja kota Makassar telah disajikan secara akuntabilitas dan realisasi anggrannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Penerapan Prinsip Islam Dalam Menciptakan Penggunaan Anggaran yang Akuntabel Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar

Allah SWT mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan serta menyebarkan ajaran Islam ke muka bumi. Nabi adalah seorang manusia yang menerima wahyu dari Allah SWT, namun tidak ada perintah untuk menyampaikan kepada kaumnya. Sedangkan rasul, selain menerima wahyu ia juga diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya. Maka bisa dikatakan bahwa setiap rasul pasti nabi, tetapi tidak semua nabi itu rasul. Sebagai utusan Allah SWT, mereka adalah manusia-manusia pilihan yang dibekali Allah SWT dengan keistimewaan-keistimewaan yang tidak terdapat pada makhluk Allah SWT yang lain. Rasul wajib memiliki empat sifat, yakni:

1. Shidiq artinya jujur. Setiap rasul pasti memiliki sifat ini. Dengan demikian segala ucapan dan perbuatannya dapat dipercaya. Dalam al-Qur'an dijelaskan:

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا

“Ceritakanlah (hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam al-Kitab (al- Qur'an) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat jujur lagi seorang Nabi.” QS. Maryam: 41.

Setiap Rasul pasti jujur dalam pengakuan atas kerasulannya. Dan apa yang disampaikan pasti benar adanya, karena bersumber dari Allah SWT. Al-Qur'an menjelaskan:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

“Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).” (QS. An-Najm : 34).

Kebalikan dari sifat ini adalah kidzb (dusta). Sifat dusta tentu mustahil bagi para Rasul.

2. Amanah : artinya dapat dipercaya. Setiap ucapan dan perbuatan seorang rasul itu dapat dipercaya, karena setiap rasul tidak mungkin melakukan segala macam bentuk kemaksiatan. Iapun tidak memiliki sifat-sifat buruk seperti hasud, riya', sombong, dusta dan lain sebagainya. Kebalikan dari sifat ini adalah khiyanah (tidak dapat dipercaya). Sifat ini juga mustahil bagi para rasul.
"Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasehat yang terpercaya bagimu." [Al A'raaf 68].
Ketika Nabi Muhammad SAW ditawari kerajaan, harta, wanita oleh kaum Quraisy agar beliau meninggalkan tugas ilahinya menyiarkan agama Islam, beliau menjawab: "Demi Allah...wahai paman, seandainya mereka dapat meletakkan matahari di tangan kanan ku dan bulan di tangan kiri ku agar aku meninggalkan tugas suci ku, maka aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah memenangkan (Islam) atau aku hancur karena-Nya"
Meski kaum kafir Quraisy mengancam membunuh Nabi, namun Nabi tidak gentar dan tetap menjalankan amanah yang dia terima.
3. Tabligh : artinya menyampaikan. Setiap rasul pasti menyampaikan apa yang telah diwahyukan oleh Allah SWT kepadanya. Dalam al-Qur'an disebutkan:
أَلْيُكْفَرُ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحَ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
"Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku memberi nasehat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui." (QS. al-A'raf : 62). Kebalikan dari sifat ini adalah kitman (menyembunyikan). Para Rasul mustahil menyimpan apapun yang telah diwahyukan kepadanya.

Manusia diciptakan untuk menjadi penguasa yang mengatur apa-apa yang ada dibumi, seperti tumbuhannya, hewannya, hutannya, airnya, sungainya, gunungnya, lautnya, perikanannya dan manusia harus mampu memanfaatkan segala apa yang ada di bumi untuk kemaslahatannya. Ini berarti bahwa manusia mendapatkan "amanah" dari Allah SWT untuk mengelolah bumi dan kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Pada prinsipnya, shidiq, amanah dan tabligh merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT sebagai sang pemberi amanah untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan. Amanah, shidiq dan tabligh dalam konteks ekonomi menyatakan bahwa segala sumber daya milik Allah dan manusia adalah "seseorang yang diberi amanah untuk menyebar misi sakral yang ditugaskan kepadanya". Misi sakral dalam hal ini adalah menyebar rahmat bagi semua makhluk dalam bentuk ekonomi, sosial, spiritual, politik, dan lain-lainnya. Konsekuensinya, manusia memang harus bertanggungjawab atas tugas yang dibebankan ini kepada Allah SWT. Lain halnya dengan konsep kapitalisme yang "mereduksi kesejahteraan dalam bentuk kesejahteraan ekonomi", Praktik akuntabel dalam konsep kapitalisme lebih menekankan pada dimensi hubungan manusia dengan manusia sehingga sifat akuntabilitas manajemen 50 lebih menekankan pada "aspek fisik yang tampak dalam laporan keuangan", Mengabaikan aspek mental yang tampak pada upaya untuk melakukan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah dalam bentuk program-program sosial, kesehatan, dan sebagainya. Sementara pada pemerintah yang berkonsep islam menekankan pada aspek fisik, mental dan juga spiritual. Dari nilai amanah, shidiq dan tabligh yang diungkapkan oleh nara sumber ditemukan konsep akuntabilitas spiritual tersebut yang berhubungan dengan keagamaan menyangkut hubungan dengan Tuhan (Habluminal). Demi memperoleh keberkahan di dunia dan akhirat kita sebagai manusia harus membina hubungan yang baik dengan Allah SWT. Dengan demikian Melakukan pertanggungjawaban sebagai perwujudan akuntabilitas berdasarkan shidiq, amanah dan tabligh dapat memotivasi setiap individu dalam mewujudkan laporan realisasi penggunaan anggaran yang akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka dapat disimpulkan, alokasi anggaran pada SKPD Makassar telah teralisasi secara efektif atau biasa dikatakan bahwa penggunaan anggaran di instansi pemerintah Makassar telah berjalan secara akuntabel. Laporan akuntabilitas penggunaan anggaran pada dinas tenaga kerja kota Makassar telah disajikan secara akuntabilitas dan realisasi anggarannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Melakukan pertanggungjawaban sebagai perwujudan akuntabilitas

berdasarkan shidiq, amanah dan tabligh dapat memotivasi setiap individu dalam mewujudkan laporan realisasi penggunaan anggaran yang akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, D., H., G., Sabanu, dan Fahrizal Noor. 2015. Accountability Index Assessment of Government Agencies. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 1(1): 21-42.
- Ahmed, Alim Al Ayub. 2012. Accounting in Islamic Perspective: A Timely Opportunity A Timely Challenge. *ASA University Review*, 6(2): 11-31.
- Amalia Fitri. 2013. Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil. *Al-Iqtishad*, 6(1): 133-142.
- Andreaus, Michele., Ericka, C. 2014. Toward An Integrated Accountability Model For Nonprofit Organizations. *Accountability and Social Accounting for Social and Nonprofit Organizations. Advances in Public Interest Accounting*, 17(4): 153-176.
- Baidhowi, B., dan Irham Zaki. 2014. Implementasi Konsumsi Islami pada Pengajar Pondok Pesantren (Studi Kasus Pada Pengajar Pondok Pesantrenal Aqobah Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang). *JESTT*, 1(9): 1-12.
- Basri Ramlah. 2013. Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada Bpm-Pd Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 1(4): 202-212.
- Boy Denny dan Hotniar Siringoringo. 2009. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (Apbs) terhadap Partisipasi Orang Tua Murid. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 14(12): 1-9.
- Carlitz Ruth. 2010. Improving Transparency and Accountability in the Budget Process: An Assessment of Recent Initiatives. : 1-25.
- Curristine, T., Zsuzsanna Lonti dan Isabelle Joumard. 2007. Improving Public Sector Efficiency: Challenges and Opportunities. *OECD Journal on Budgeting*, 7(1): 1-42
- Epstein, M. J., & McFarlan, F. W. 2011. Measuring the efficiency and effectiveness of a nonprofit's performance. *Strategic Finance*, 93(4): 27-34.
- Fitriani Dewi. 2014. Balanced Scorecard: Alternatif Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Cakrawala Akuntansi*, 6(1): 16-31.
- Fry L.W., Vitucci S., and Ceditllo, M. 2005. Transforming the Army through spiritual leadership. *The Leadership Quarterly* 16(5): 835- 862.
- Hamidi Mohamad Fauji. 2014. Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban. *DIA, Jurnal Administrasi Publik*, 12(1): 39-62.
- Jacob, Kerry. 2004. The Sacred And The Seculer: Examining The Role Of Accounting In The Relegius Context. Departement Of Accounting And Management, School of Business. La Trobe University, Melbourne, Australia. *Research Article*. 18(2): 72-89.
- Julita, 2012. Analisis Epektifitas dan Efesiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. 1-9.
- Klychova, Faskhutdinova, dan Sadrieva. 2014. Budget Efficiency for Cost Control Purposes in Management Accounting System. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(24): 79-82.
- Kriger, M. and Seng, Y. 2005. Leadershipwith inner meaning: Acontingency theory of Leadershipbased on the wordlviews of fivereligions. *The LeadershipQuarterly* 16(1): 771-806
- Maddocks, J. 2011. Debate: Sustainability reporting: A missing piece of the charity-reporting jigsaw. *Public Money & Management*, 31(3): 157-158.
- Pangumbalerang, A dan Sherly Pinatik. 2014. Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah. *Kejelasan Sasaran Anggaran*, 2(2): 800-808.
- Prasetyo. J., E. 2017. Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 1(1): 19-33.

- Purnama, F., dan Nadirsyah. 2016. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(2): 1-15.
- Ruddy Viali Pangau, P., dan Endang Dwi Retnani. 2013. Penggunaan Anggaran dalam Penilaian Kinerja Manajemen. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 2(10): 1-21.
- Ruddy Viali Pangau, R., V., dan Endang Dwi Retnani. 2013. Penggunaan Anggaran dalam Penilaian Kinerja Manajemen. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 2(10): 1-21
- Ryan, Christine; Trevor Stanley dan Morton Nelson. 2002. Accountability Disclosure by Queensland Local Government Councils: 1997-1999." *Financial Accountability & Management*. 18(3): 1-23.
- Sulfiati, Andi Samsu Alam, dan Andi Lukman Irwan. 2010. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sinjai. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2): 113-122.
- Viali Pangau, R., dan Endang Dwi Retnani. 2013. Penggunaan Anggaran dalam Penilaian Kinerja Manajemen. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 2(10): 1-21.
- Waworuntu, R., H., dan Treesje Runtu. 2014. Analisis Perubahan Sistem Penganggaran di Indonesia dan Pengaruhnya pada Kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. *Analisis Perubahan Siste*, 2(3): 559-569.
- Wina. I., P., H., dan Siti Khairani. 2008. Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Dispenda Prov, Dispenda Kota, Dan Dishub Prov): 1-15.